

PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Trintje Lambey¹, Sandra Asaloei², Jones Tompodung³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: lambeytrintje@unsrat.ac.id

Email: sandraasaloei@unsrat.ac.id; ostompdung@unsrat.ac.id

ABSTRACT

The success of regional autonomy is inseparable from the factor of good and proper governance. Good and proper governance is governance that is able to make the community prosperous and wealthy. The output of good and proper governance is a government system with good governance. This study aims to: Understand the influence between Village Government Governance and Performance Improvement for Village Government Officers in Wori District, North Minahasa Regency. The method used in this study is the Quantitative method. According to Sugiyono (2018), quantitative data is data in numerical form, or quantitative data that is scored. The data sources used can be in the form of Primary Data and Secondary Data. Primary data can be obtained through Questionnaires, while Secondary data can be obtained through statistical data. Statistics in the form of a Description of the Research Area. The population was determined to be 60 respondents. The results of the study show: 1). That in order to improve good governance, especially for village government officials, an increase in Performance for Village Government Officials is needed. 2). The results of the study show that the relationship or influence of variable X is 0.515, which can be applied as follows: for every 1 unit increase in Village Government Governance, the performance of village government officials will increase by 0.515. 3). Meanwhile, the remaining 54.70% is influenced by other variables that are not explained in this study.

Keywords: Governance, Village Administration, Performance, Apparatus.

ABSTRAK

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang good governance. Penelitian ini bertujuan : Ingin mengetahui pengaruh antara Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Peningkatan Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Kuantitatif. Dimana menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Sumber data yang digunakan dapat berbentuk data Primer dan Data Sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui Kuesioner sedangkan data Sekunder dapat diperoleh melalui data statistik berupa Deskripsi Wilayah Penelitian. Penentuan Populasi ditetapkan sebanyak 60 Responden. Dari hasil penelitian membuktikan: 1). Bahwa untuk meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik khususnya bagi aparat pemerintah Desa maka dibutuhkan peningkatan terhadap Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa. 2). Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan atau pengaruh variabel X sebesar 0.515 yang dapat diaplikasikan bahwa setiap peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa sebesar 1 satuan, maka Kinerja aparat pemerintah desa akan meningkat sebesar 0,515. 3). Sedangkan sisanya 54.70 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Tata Kelola, Pemerintahan Desa, Kinerja, Aparat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

206

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, maka tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diembankan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Salah satu aspek menarik untuk dikaji dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah memaksimalkan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Tata Kelola pemerintahan Desa adalah merupakan salah satu aplikasi dari Manajemen pemerintahan yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Good Governance merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga good governance berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative. Untuk mencapai good governance dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk meningkatkan Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa. Untuk meningkatkan Kinerja Aparat pemerintah Desa maka perlu dilakukan berbagai prinsip yang mendasar diantaranya perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Sebelum diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tata Kelola. Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata Kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi. Tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan sebutan “good governance”, maka secara umum dalam pemahamannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti, (2008).

Dalam hal ini, ketiga prinsip tersebut bahwa pengelolaan tata pemerintahan Desa harus perlu mendapatkan perhatian. Karena difahami bahwa Tata kelola Desa di Indonesia berubah secara drastis semenjak diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dalam penjelasannya menempatkan desa sebagai daerah otonom. Artinya adalah, dengan amanat yang ada pada UU tersebut, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Tata Kelola Pemerintah Desa akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka Fokus penelitian ini dititikberatkan pada pengaruh tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana responden dalam penelitian ini meliputi pemerintah dan masyarakat. Dalam pengambilan sampel penelitian maka yang menjadi dasar Populasi adalah seluruh Aparat Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Untuk penentuan sampel Desa maka akan ditetapkan secara acak yakni pada 6 Desa yaitu: 1). Desa 22 Darunu, 2). Desa Nain, 3). Desa Mantehage I, 4). Desa Lantung, 5). Desa Lansa, 6). dan Desa, Tatampi. Dari penentuan Desa Sampel sebagaimana dikemukakan diatas, maka untuk penentuan sampel akan ditetapkan sebanyak 10 responden untuk tiap Desa Sampel sehingga jumlah sampel responden adalah sebanyak 60 Responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian data melalui Program SPSS 26 Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1). Melakukan Pengujian Uji Validitas Data
- 2). Melakukan Pengujian Uji Reabilitas Data
- 3). Melakukan Pengujian dengan Uji Asumsi Klasik, yaitu dengan Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas,
- 4). Melakukan Pengujian dengan Uji Hipotesis dan Uji T
- 5). Selain Pengujian sebagaimana dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian Korelasi Koefesien Berganda dengan penentuan besarnya Nilai R serta Analisis Koefesien Determinasi berganda untuk menentukan Nilai R².

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dala pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel, apabila R hitung > R tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Jumlah uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 60 responden, dengan jumlah sampel 60 (df=N-2) dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat diketahui R tabel = 0.2542 (Ghozali, 2016:52-55). Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan kuesioner dari variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dan Kinerja Aparat Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

Tabel V.1.

Uji Validitas Variabel Tata Kelola Pemerintahan Desa (X)

Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X p1	0.402	0.2907	Valid
X p2	0.425	0.2907	Valid
X p3	0.398	0.2907	Valid
X p4	0.415	0.2907	Valid
X p5	0.366	0.2907	Valid

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai pernyataan 5 pada jumlah sampel (N) sebanyak 60, hal itu dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R table Sehingga pernyataan dari variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai pernyataan 5 pada jumlah sampel (N) sebanyak 60, hal itu dinyatakan valid karena nialai R hitung lebih besar dari R Tabel Sehingga pernyataan dari variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Penerbit:

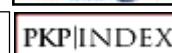
LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

208

Indexed



SINTA 4



Tabel V.2.

Uji Validitas Variabel Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Y)

Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Y p 1	0.707	0.2907	Valid
Y p 2	0.482	0.2907	Valid
Y p 3	0.596	0.2907	Valid
Y p 4	0.644	0.2907	Valid
Y p 5	0.592	0.2907	Valid

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai pernyataan 5 pada jumlah sampel (N) sebanyak 60, hal itu dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R Tabel Sehingga pernyataan dari variabel Kinerja Aparat Pemerintah Desa digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini di lakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpulan data yang digunakan. Pengujian reliabilitas dengan konsistensi internal di lakukan dengan cara mencoba instrumen sekali, kemudian data diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik *cronbach alpha* (koefisien alfa) suatu item pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih dari 0,60.

Uji reliabilitas berorientasi pada suatu pengertian bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat di percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan alat bantu SPSS versi 26. Suatu angket dikatakan reliabel jika nilai r yang dihasilkan adalah positif dan lebih besar dari r alpha tabel.

Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh R hitung untuk variabel Tata Kelola Pemerintah Desa sebesar 0,705. dan Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Y) sebesar 0,803. Semua variabel diatas memperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan 0,6. Artinya instrument variabel Tata Kelola Pemerintah Desa dan Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Y) dinyatakan reliabel. Dengan demikian kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif), maka model tersebut harus memenuhi Uji Asumsi Klasik Regresi, meliputi :

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), bahwa Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk dapat mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat nilai signifikansi pada tabel *Kolmogorof – Smirnov*. Dengan ketentuan, jika Tingkat signifikan > 0,05 atau 5% maka kesimpulannya adalah data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogrof-Smirnov Test* sebagaimana tertera pada tabel diatas, maka diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peneliti apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10% dan VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

bebas dari multikolinieritas.

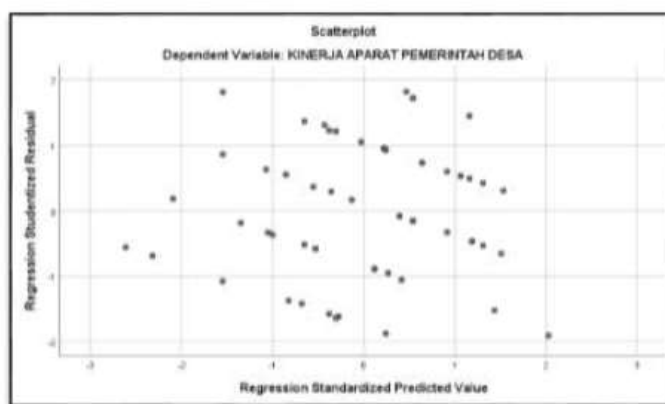
Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada model regresi, diperoleh data bahwa nilai *tolerance* masing-masing biaya $> 0,10$. Artinya bahwa nilai VIF tersebut masing-masing $< 10,00$. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat heteroskedastisitas dan dalam penelitian metode yang digunakan untuk menguji menggunakan grafik *scatterplot* dan analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka keadaan demikian mengidentifikasi adanya gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka keadaan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 26 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil output uji heteroskedastisitas pada model regresi seperti yang tertera pada gambar diatas, dapat dilihat adanya titik-titik menyebar membentuk pola yang tidak jelas atau titik-titik tidak membentuk pola tertentu serta penyebaran titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka tentunya dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan

yang disebut dengan *good governance*. *Good Governance* merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative. Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah tata kelola pemerintah Desa, yang diharapkan akan berfungsi untuk meningkatkan pelayanan Publik atau yang disebut dengan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan haruslah mengacu pada beberapa prinsip, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, ketiga prinsip pengelolaan tata pemerintahan, akan mampu meningkatkan system pelayanan yang berkualitas. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan haruslah mengacu pada beberapa prinsip, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, ketiga prinsip pengelolaan tata pemerintahan, perlu mendapatkan perhatian dalam menunjang tugas pelayanan dalam hal ini adalah pelayanan Publik.

Perlu difahami bahwa Tata kelola Desa di Indonesia berubah secara drastis semenjak diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dalam penjelasannya menempatkan desa sebagai daerah otonom. Artinya adalah, dengan amanat yang ada pada UU tersebut, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman yang dirasakan semakin hari semakin berkembang, maka tuntutan, harapan dan tanggung jawab yang diemban kepada pemerintah desa juga semakin meningkat. Salah satu aspek menarik untuk dikaji dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah memaksimalkan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Tata Kelola pemerintahan Desa adalah merupakan salah satu aplikasi dari Manajemen pemerintahan yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

KESIMPULAN

Bahwa untuk meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik khususnya bagi aparat pemerintah Desa maka dibutuhkan peningkatan terhadap Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan atau pengaruh variabel X sebesar 0.515 yang dapat diaplikasikan bahwa setiap peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa sebesar 1 satuan, maka Kinerja aparat pemerintah desa akan meningkat sebesar 0,515. Bahwa dalam analisis Koefisien Determinasi dibuktikan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,453 atau yang diaplikasikan sebesar 45.30 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Aparat Pemerintah Desa telah dipengaruhi oleh adanya Tata Kelola Pemerintahan Desa , karena diperoleh hasil sebesar sebesar 45.30 %. Sedangkan sisanya 54.70 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Arif Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" jurnal Hukum dan Pemerintahan vol.4, no.1 (2016)
- Achmad Daniri, 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya. Jakarta. Ray Indonesia
- Ali Mufiz, 2004. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Dwiyanto Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

211

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Bacal, Robert. 2001. *Performance Management*. Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan, Jakarta.
- Barnard, Chester L. 1940, *The Functions of the Executive*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
- Castetter, W.B., 1981. *The Personal Function In Administration*. Mc. Graw Hill Book Co. New York.
- Dale Furtwengler, 2007, *Penilaian Kinerja*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.
- Drucker P., 1982. *The Practice Of Management*. Harper, New York.
- Dwiyanto, A. 1995. *Penilaian Kerja Organisasi Publik*. Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro, et.al, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD),
- George Terry, 1970, *Organisasi dan Management*, Penerbit Gunung Mulia Jakarta.
- Gibson, J. L., J. M. Ivancevich dan J. H. Donnelly. 1989. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan Sugondo. Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadari Nawawi, 2000, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, CV Rajawali Jakarta.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hasibuan, M.S.P, 2002. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Handoko, H. T. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi 2. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Kadjatmiko. HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Keith Davis dan John W. Newstrom, 2004, *Prilaku dalam Organisasi*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Kiggundu, M. N., 1989. *Managing Organization in Developing Countries: an operation and strategies approach*. Kumarian Press, Inc., West Harford.
- Koontz .Harold, O'Donell, Cytil , *Essentials of Management 2nd edt* ,New York ,Mc Graw Hill Book Company, 1978,
- Kristiadi. J.B. 1997, *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Nasional.
- Mangkuprawira, Tb.S., 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia Startegik*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

212

